

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pendapatan suatu negara mencerminkan bagaimana negara tersebut maju dan berkembang untuk kelangsungan negara dan kesejahteraan dari masyarakat negara tersebut di masa mendatang. Lokasi suatu negara tentunya akan sangat menentukan pendapatan negara tersebut, semakin strategis lokasi suatu negara maka akan semakin banyak investasi yang masuk ke negara tersebut. Banyaknya investasi yang masuk ke suatu negara maka akan menyebabkan peningkatan pendapatan negara melalui sektor penerimaan pajak (Putra dan Merkusiwati, 2016).

Waluyo (2011) menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Indonesia mendapat pendapatan terbesar di antara pendapatan lainnya, yaitu melalui pendapatan pemungutan pajak yang menyumbang rata-rata lebih dari 70% dari keseluruhan pendapatan negara dalam berbagai fungsi kenegaraan (Michael Salim, 2012).

Penerimaan pajak di Indonesia mendatangkan hasil yang cukup besar bagi pelaksanaan pembangunan. Pajak dibayarkan kepada Negara oleh rakyat dengan dipaksakan dan tidak mendapat timbal balik secara langsung, selanjutnya akan digunakan untuk pembiayaan negara (Soemitro dalam Mardiasmo, 2011).

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisienkan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya (Yoehana, 2013).

Belum mampunya pemerintah merealisasi penerimaan pajak secara maksimal menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan penghindaran pajak, ataukah memang pemungutan yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal dan apakah target yang ingin dicapai terlalu tinggi. Penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan, baik di tingkat pusat maupun daerah (Putra dan Merkusiwati, 2016).

Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman Wajib Pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak (Dharma & Suardana, 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 Ayat 1 menyatakan bahwa Setiap Wajib Pajak

wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat ataupun perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Karena bagi masyarakat atau perusahaan pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi penghasilan mereka. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat atau perusahaan melakukan upaya untuk menghindari pajak. (Dian Eva Marlinda, dkk, 2020).

Berikut adalah beberapa contoh fenomena *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) yang terjadi pada perusahaan yang memiliki bisnis di Indonesia:

Fenomena *tax avoidance* yang pertama yaitu terjadi pada PT. Waskita Karya. Pada tahun 2018 PT. Waskita Karya melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan tingkat utang yang tinggi yaitu dengan cara memanfaatkan modal yang berasal dari pinjaman atau utang. Bertambahnya hutang dapat menimbulkan biaya bunga yang harus dibayarkan oleh badan usaha. Item biaya dapat meminimalisir profit sebelum kena pajak organisasi, sehingga biaya pajak yang wajib badan usaha bayar dapat berkurang. PT. Waskita melaporkan kenaikan utang yang signifikan dari Rp75,14 T pada tahun 2017 menjadi Rp. 95,50 T pada tahun 2018. Sementara perusahaan mencatat kenaikan tipis atas pendapatan usaha yaitu sebesar Rp.3,39 T pada tahun 2018

([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com))



Gambar 1.1

### Fenomena *Tax Avoidance* pada PT Adaro Energy

Fenomena *tax avoidance* yang kedua terjadi pada PT Adaro Energy. Berdasarkan laporan internasional dari Global Witness yang dirilis pada Kamis, 4 Juli 2019, PT. Adaro diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak

perusahaannya Coaltrade Service Internasional yang berada di Singapura, melalui *transfer pricing*.

Caranya bisa dibagi menjadi dua. Pertama, Adaro menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga rendah kepada Coaltrade untuk kemudian dijual kembali oleh anak perusahaan itu dengan harga lebih tinggi. Selama 2009-2017, *Global Witness* mencatat lebih dari 70 persen batu bara yang dijual Coaltrade berasal dari tambang batu bara Adaro di Indonesia. Kedua, *Global Witness* juga mendapati Coaltrade menerima komisi dari pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya. Komisi penjualan batu bara bernilai sekitar 4 juta dolar AS per tahun sebelum 2009. Lalu, antara 2009-2017, angka itu berubah menjadi 55 juta dolar AS per tahun. Coaltrade pun memanfaatkan peluang ini untuk memperoleh laba dan membukukannya di Singapura yang notabene tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia. Nilai pajak yang dapat dikumpulkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 125 juta dolar AS dari pajak penghasilan perusahaan atau setara 14 juta dolar AS per tahunnya.

(<https://tirto.id> )

Fenomena *tax avoidance* yang terakhir yaitu terjadi pada anak perusahaan PT Lippo Cikarang yaitu Saham PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat, tidak lagi sepenuhnya dimiliki Lippo Group. Bahkan kini, 49,999 persen kepemilikan saham perusahaan tersebut telah dimiliki investor asing.

Investasi Perusahaan Cangkang di Balik  
Megaproyek Meikarta



Gambar 1.2

Fenomena *Tax Avoidance* pada PT Lippo Cikarang

Merujuk laporan keuangan per 31 Desember 2018 PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) yang merupakan induk usaha PT MSU, pada 31 Januari 2017 pemegang proyek meikarta dimiliki oleh 2 anak perusahaan lippo yaitu PT Megakreasi Cikarang Damai dan PT Great Jakarta Inti Development. Pada 1 Februari 2017, dua entitas anak usaha PT Megakreasi Cikarang Permai (MKCP) dan PT Great Jakarta Inti Development (GJID) menyetujui masuknya pemegang saham baru.

Pemegang saham baru tersebut yakni Peak Asia Investment Pte. Ltd (PEAK). Berada di balik PEAK terdapat Hasdeen Holdings Ltd (HH), sebuah perusahaan cangkang yang didirikan di British Virgin Islands (BVI), dalam proyek baru PT Mahkota Sentosa Utama melalui penempatan investasi saham pada PEAK

yang akan diterbitkan kemudian yang disepakati dalam perjanjian jual beli bersyarat pada 10 Maret 2017.

Masih dari laporan yang sama, meskipun nilai saham Peak Asia hanya satu dolar AS, pada proses akuisisi Hasdeen ternyata diwajibkan menyetero uang sekitar Rp4 triliun. "Partisipasi tidak langsung Hasdeen melalui PEAK sebesar USD300.000.000 akan diangsur, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai tanggal 31 Desember 2018.

Masih merujuk laporan keuangan triwulan I 2018, kepemilikan 100 persen saham PT Mahkota di bawah kendali Lippo. Jika mengaitkan hierarki antara PT Mahkota, Peak Asia, dan Hasdeen, klaim ini mengindikasikan Lippo-lah di balik perusahaan cangkang Hasdeen Holdings.

Klaim ini tentu janggal sebab, seperti yang tertera dalam dokumen kepemilikan saham, investor utama Peak Asia adalah Hasdeen, bukan Lippo. Jika Lippo masih mengklaim di belakang Peak Asia, maka penulis menduga lippo berada di belakang Hasdeen.

Salah satu modus utama pengusaha membentuk perusahaan cangkang biasanya untuk menghindari pajak. Dengan melibatkan banyak perusahaan yang diduga masih anak perusahaan sendiri sebagai skema manajemen risiko. Skema ini membuat Lippo relatif lebih aman dan lebih memungkinkan untuk lari dari pajak.

(<https://tirto.id/>)

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* dalam suatu perusahaan (Grace Patricia dan Susanto Wibowo, 2019). Selain itu

sudah banyak peneliti yang telah melakukan penelitian dengan berbagai variabel dan menghasilkan kesimpulan yang beragam pula (Efrida Siboro dan Hendra F. Santoso, 2021)

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah sebagai berikut:

1. Konservatisme Akuntansi yang diteliti oleh 7 peneliti.
2. *Financial Distress* yang diteliti oleh 9 peneliti.
3. *Capital Intensity* yang diteliti oleh 7 peneliti.
4. *Sales Growth* yang diteliti oleh 2 peneliti.
5. Kompensasi Rugi Fiskal yang diteliti oleh 2 peneliti.
6. Pertumbuhan Penjualan yang diteliti oleh 2 peneliti.
7. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh 3 peneliti.
8. Kepemilikan Institusional yang diteliti oleh 2 peneliti.
9. *Corporate Social Responsibility* yang diteliti oleh 3 peneliti.
10. *Leverage* yang diteliti oleh 6 peneliti.
11. *Inventory Intensity* yang diteliti oleh 3 peneliti.
12. Kompensasi Manajemen yang diteliti oleh 2 peneliti.
13. Profitabilitas yang diteliti oleh 4 peneliti.
14. *Thin Capitalization* yang diteliti oleh 1 peneliti.
15. *Transfer Pricing* yang diteliti oleh 3 peneliti.



**Tabel 1.1**

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance***

**Berdasarkan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	<i>Konservatisme Akuntansi</i>	<i>Financial Distress</i>	<i>Capital Intensity</i>	<i>Sales Growth</i>	Kompensasi Rugi Fiskal	Pertumbuhan Penjualan	Ukuran Perusahaan	Kepemilikan Institusional	<i>Corporate Social Responsibility</i>	<i>Leverage</i>	<i>Inventory Intensity</i>	Kompensasi Manajemen	Profitabilitas	<i>Thin Capitalization</i>	<i>Transfer Pricing</i>
1.	Vinny Alvionita, dkk.	2021	√	√	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviani	2017	-	-	√	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
3.	Safirra Salsa Nabilla dan Imam Zul Fikri	2018	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-







21.	Syalsabila Haya dan Sekar Mayangsari	2022	-	X	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
22.	Fitri Riski Riyadi dan Nurjanti Takarini	2023	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-

Sumber: Data diolah penulis

Keterangan:

√ = Berpengaruh Signifikan

X = Tidak Berpengaruh Signifikan

- = Tidak Meneliti

Penelitian ini merupakan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vinny Alvionita, dkk. (2021) dengan judul “Pengaruh Konservatisme Akuntansi, *Financial Distress*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*”.

Variabel-variabel yang diteliti oleh Vinny Alvionita, dkk. (2021), yaitu Konservatisme Akuntansi, *Financial Distress*, dan *Capital Intensity* sebagai variabel independen dan *Tax avoidance* sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian yaitu pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Unit analisis pada penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Unit observasi pada penelitian menggunakan laporan keuangan tahunan

perusahaan, diakses pada situs resmi BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Yang terdiri dari, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Teknik *Sampling* yang digunakan dalam penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan sebanyak 7 perusahaan dengan jumlah populasi amatan sebanyak 160 dalam 5 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel konservatisme akuntansi berpengaruh negatif signifikan pada *tax avoidance*, variabel *financial distress* berpengaruh negatif signifikan pada *tax avoidance*, dan variabel *capital intensity* berpengaruh simultan terhadap *tax avoidance*.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu unit analisis yang diteliti. Unit analisis dalam penelitian Vinny Alvionita, dkk. (2021) adalah seluruh perusahaan manufaktur. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan unit analisis Perusahaan Sektor *Energy*. Pada tahun 2020 Bursa Efek Indonesia (BEI) menerapkan *IDX Industrial Classification* atau *IDX-IC* untuk mengklasifikasikan perusahaan tercatat. Hasil dari *IDX Industrial Classification* tersebut perusahaan pertambangan termasuk ke dalam perusahaan sektor *energy*. Alasan memilih perusahaan ini karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melihat sektor pertambangan ini sektor yang rawan praktik korupsi, salah satunya penghindaran pajak. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp.15,9 triliun per tahun (DDTCNews, 2019).

Alasan penulis dalam pemilihan variabel karena pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai Konservatisme Akuntansi, *Financial Distress*, *Capital Intensity*, dan *Tax Avoidance* terdapat perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian

yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya memberikan hasil yang tidak konsisten dalam penelitiannya.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Vinny Alvionita, dkk. (2021), Deby Kustia Pratiwi dan Atik Djajanti (2022), dan Riska Sakhiya Ellyanti dan Titiek Suwarti (2022) menunjukkan bahwa Konservatisme Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Agung Istri Windaryani dan I Ketut Jati (2020), dan Renaldi Alfarasi dan Dul Muid (2022) menunjukkan bahwa Konservatisme Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Vinni Alvionita, dkk. (2021), Yoana Aulia Putri dan Harti Budi Yanti (2022), dan Renaldi Alfarasi dan Dul Muid (2022) menunjukkan bahwa *Financial Distress* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Devi Pratiwi, dkk. (2021), Deby Kustia Pratiwi dan Atik Djajanti (2022), dan Novi kurubah dan Suyatmin Waskito Adi (2022), menunjukkan bahwa *Financial Distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Vinni Alvionita, dkk. (2021), Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017), Nikita Artinasari dan Titik Mildawati (2018), Efrida Siboro dan Hendra F. Santoso (2021), Roslan Sinaga dan Harman Malau (2021) dan Yoana Aulia Putri dan Harti Budi Yanti (2022) menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh dan Jeri Chomarus

Ritonga (2019) menunjukkan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan uraian dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pengaruh Konservatisme Akuntansi, *Financial Distress*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Sektor *Energy* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, antara lain dengan cara menurunkan harga jual kepada anak perusahaan.
2. Penyebab perusahaan melakukan penghindaran pajak karena tingginya tarif pajak di Indonesia.
3. Dampak dari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yaitu, perusahaan tersebut mendapat panggilan dari Panitia Kerja Perpajakan dan perusahaan juga diselidiki oleh Ditjen Pajak.



### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
2. Bagaimana *Financial Distress* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
3. Bagaimana *Capital Intensity* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
4. Bagaimana *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
5. Seberapa besar pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
6. Seberapa besar pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
7. Seberapa besar pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
2. Untuk menganalisis *Financial Distress* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
3. Untuk menganalisis *Capital Intensity* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
4. Untuk menganalisis *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memberi kontribusi teori serta memperluas ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh Konservatisme Akuntansi, *Financial Distress*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, referensi, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Konservatisme Akuntansi dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk mencegah adanya asimetri informasi dengan cara membatasi agen dalam melakukan praktik manipulasi laporan keuangan.
2. *Financial Distress* dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk mengetahui apakah perusahaan berada di zona aman, zona abu-abu, atau *zona distress*.
3. *Capital Intensity* dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai seberapa besar modal yang dibutuhkan suatu perusahaan.
4. *Tax Avoidance* dapat dijadikan informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk menilai baik atau buruknya suatu perusahaan.

## 1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya:

### A. Bagi Penulis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai Konservatisme Akuntansi yang dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *Financial Distress* yang dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *Capital Intensity* yang dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

### B. Bagi Perusahaan

1. Konservatisme Akuntansi digunakan sebagai prinsip penting dalam pelaporan keuangan agar pengakuan dan pengukuran aset dan laba dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, karena aktivitas ekonomi dan bisnis dilingkupi ketidakpastian.
2. *Financial Distress* dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan agar lebih memperhatikan kondisi keuangan agar tidak terjadinya *Financial Distress* untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam hal *Tax Avoidance*.

3. *Capital Intensity* digunakan perusahaan sebagai bahan informasi aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dapat mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan.
4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) karena akan merugikan negara dan akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Untuk memperoleh informasi dan pengambilan data yang dibutuhkan, peneliti mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) serta situs-situs resmi Perusahaan Sektor *Energy* tahun 2018-2022. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juni tahun 2023 hingga penelitian selesai dilakukan.